

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Simpulan Umum**

Konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya memiliki tiga cakupan utama yaitu *civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan, *civic skill* atau keterampilan kewarganegaraan dan *civic disposition* atau watak kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan penjabaran permendikbud tersebut memiliki tujuan untuk membina peserta didik agar mereka sebagai generasi muda yang bisa menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Peserta didik diajarkan tentang kebhinnekaan Indonesia yang telah ada sejak Indonesia lahir. Sebagai pendidikan multikultural pendidikan kewarganegaraan membina peserta didik agar mereka memiliki kesadaran akan kemajemukan bangsa ini. Bangsa ini tak hanya dibangun atas satu suku atau agama saja, akan tetapi juga dibangun atas dasar persamaan sejarah. Sehingga peserta didik harus menghilangkan sifat *chauvisme* atau merasa lebih unggul dari suku lainnya. Tak hanya itu saja, pendidikan kewarganegaraan juga menanamkan cinta lingkungan. Lingkungan adalah tempat manusia tinggal sehingga harus dijaga kelestariannya, agar manusia bisa hidup selaras dengan alam.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bersifat multidimensional. Topik-topik PKn yang mengacu pada topik kewarganegaraan tersebut diantaranya, yaitu kebutuhan peserta didik di abad 21, tentang *diversitas*, ketergantungan antar negara, dampak globalisasi dan teknologi. PKn 2006 terdiri dari Persatuan dan Kesatuan bangsa., Norma, hukum, dan peraturan. , Hak Asasi Manusia, Kebutuhan warga Negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila, Globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Wahab seorang ahli PKn menyatakan bahwa topik pendidikan kewarganegaraan memuat materi yang berkaitan dengan isu-isu globalisasi. Hal ini sudah menjadi keharusan dengan kebutuhan pendidikan abad 21.

Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2013 memiliki cakupan materi yang begitu luas sehingga kompetensi dasarnya begitu rinci. Hal ini tentunya berdampak pada topik-topik yang didalami oleh siswa menjadi lebih mendalam. Kurikulum 2013 memiliki sistematika yang lebih teratur dan seimbang antar komponen yang mencakup 3 ranah, baik *civic knowledge*, *civic skill* maupun *civic disposition*.

## 2. Simpulan Khusus

Berdasarkan Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menemukan komponen-komponen yang secara khusus mengenai Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mempersiapkan Warga Global. Adapun kesimpulan khususnya sebagai berikut:

- a. Dimensi pendidikan global pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan terdapat pada beberapa aspek, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keragaman etnis, pluralisme budaya dan semakin saling ketergantungan. Pendidikan Kewarganegaraan baik 2006 maupun 2013 memiliki topik-topik yang telah disusun berdasarkan dimensi kewarganegaraan memiliki topik-topik yang telah memenuhi syarat dalam mempersiapkan warga global. Pada ranah pengetahuan kewarganegaraan topik mencakup, topik *pengetahuan* keadilan sosial, identitas dan kebangsaan, globalisasi dan ketergantungan antar negara, dan Hak Asasi Manusia. Pada ranah *psikomotor* atau *civic skill* siswa dibekali keterampilan *Empati*, keterampilan berkomunikasi, dan keterlibatan siswa dimasyarakat. Sedangkan dalam *civic disposition* atau watak warga negara mencakup memiliki siswa diajari agar memiliki nilai-nilai kebhinekaan, dan siswa dibangun agar memiliki jatidiri sebagai warga negara yang beradab.
- b. Perbandingan antara pendidikan kewarganegaraan tahun 2006 dan 2013 bisa dibedakan melalui tiga sudut pandangan. *Pertama*, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan PKn 2006 yaitu (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara umum dan belum terperinci. Sedangkan PPKn 2013 memiliki tujuan dengan empat pilar sebagai tujuannya. Yaitu Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia. *Kedua* konten kurikulum tidak terbagi secara merata. Materi disajikan berdasarkan empat pilar dengan pembahasan yang terpisah-pisah. Pancasila dan Kewarganegaraan disajikan sebagai pengetahuan yang harus dihafal sedangkan PPKn 2013 Materi disajikan tidak berdasarkan pada pengelompokkan menurut empat pilar kebangsaan tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar dalam pembentukan.

- c. Pancasila di era globalisasi haruslah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideology terbuka memiliki keuntungan karena dapat menerima ideology lainnya selama tak bertentangan secara mendasar. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. PKN berbasis nilai juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan terhadap nilai-nilai yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap

warisan nilai-nilai mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat.

## **B. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini adalah kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang ada saat pada dasarnya telah menyediakan topik-topik agar siswa sebagai generasi muda dipersiapkan menjadi warga negara global. Topik-topik ini secara umum telah memfasilitasi siswa agar memiliki sudut pandang yang lebih luas, baik secara lokal, nasional maupun global. Sehingga diharapkan dimasa depan kelak siswa mampu menjadi warga negara yang cerdas dan baik baik yang memiliki prespektif yang luas didalam diri mereka.

## **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas maka peneliti merekomendasikan beberapa catatan kepada pihak yang terkait dalam rangka mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan agar dimasa depan mata pelajaran ini memiliki konten yang lebih *power full*. Pihak-pihak terkait tersebut yaitu:

### **1. Kepada Kementrian Pendidikan dan Badan Standar Nasional Pendidikan**

Melalui kementrian pendidikan dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menginstruksikan agar kementerian tersebut merancang program baik jangka panjang, menengah dan pendek guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ada tiga rekomendasi yang diberikan peneliti yaitu :

- 1) Perlu ada program evaluasi kurikulum, khususnya pendidikan kewarganegaraan setiap tahunnya, mencatat perkembangan diakhir tahun khususnya dibulan Juni. Hal ini agar pemerintah dapat meninjau penerapan kurikulum disekolah setiap tahunnya.
- 2) Kementrian pendidikan dan BSNP meninjau terus perkembangan kurikulum dibeberapa negara lainnya seperti ASEAN dan ASIA, agar

secara konten pendidikan kewarganegaraan global selalu sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman, Peninjauan kurikulum bisa dilakukan dengan mempublikasi perkembangan informasi seputar kurikulum dan pendidikan dan tentunya sumber ini bisa diakses secara mudah oleh peneliti dan pengembang kurikulum,

- 3) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemendiknas) mendorong riset mengenai kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Riset ini bertujuan agar pengembangan kurikulum khusus pendidikan kewarganegaraan bisa ditingkatkan lagi mutunya dengan cara ilmiah. Selain itu memfasilitasi peneliti dengan mempermudah akses jurnal dan informasi perkembangan kurikulum dan konten kurikulum kewarganegaraan diberbagai belahan dunia.

## 2. Kepada Pengembang Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan

Pengembang kurikulum pendidikan yang terdiri dari ahli kurikulum dan akademisi pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sebagai konseptor materi yang akan diterapkan di sekolah maka dari itu rekomendasi yang peneliti berikan adalah:

- 1) Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus berdasarkan pada riset yang mendalam, sehingga implementasinya bisa berjalan dengan baik. Riset yang telah difasilitasi kemudian bisa menjadi salah satu bahan acuan dalam mengembangkan kurikulum kewarganegaraan.
- 2) Mengembangkan sistem kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang *powerfull* dan mudah dimengerti oleh guru dan siswa. Hal ini dilakukan dengan melibatkan guru sebagai orang yang mengetahui sumber permasalahan dikelas. Guru dan siswa bisa dilibatkan agar pengembang kurikulum bisa lebih luas mendalami permasalahan dan kemudian menemukan solusinya.
- 3) Melakukan evaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan secara berkala agar bisa diketahui kekuarangan dan kelebihan kurikulum

tersebut. Berkala bisa dilakukan dengan membuka lokarya ilmiah atau seminar mengenai pendidikan kewarganegaraan setiap tahunnya. Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong pendidikan kewarganegaraan agar lebih baik kedepannya.

### **3. Kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan**

Guru pendidikan kewarganegaraan adalah pionir terdepan dalam menyampaikan dan melaksanakan konten kurikulum. Guru juga merupakan pengembang kurikulum dikelas, sehingga jalannya kurikulum bergantung pada guru tersebut. Adapun rekomendasi yang peneliti berikan bagi guru adalah

- 1) Guru pendidikan kewarganegaraan harus lebih memahami lagi konten kurikulum tersebut dengan baik.
- 2) Mengikuti program pelatihan secara berkala yang telah dibuat oleh bsnp atau program yang telah dicanangkan oleh kementerian pendidikan.
- 3) Melalui Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) diharapkan bisa menjadi sarana dalam pengembangan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih baik kedepannya. Forum ini menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran dan gagasan agar apa yang dicita-citakan oleh pendidikan kewarganegaraan bisa terrealisasi secara maksimal.

### **4. Kepada Peneliti selanjutnya**

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya mendalami lagi berbagai acuan dan informasi kurikulum agar lebih maksimal hasil penelitiannya.